



BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Rengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  21. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1849/XII/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan

Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.525.387.965.574,-, yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.278.735.827.642,-, yang terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;  
dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.154.143.211.242,-.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.989.450.000,-.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.273.308.815,-
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.329.857.585,-.

#### Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) direncanakan sebesar Rp.154.143.211.242,- terdiri atas :

- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.712.100.000,-
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.279.706.000,-
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.050.000.000,-
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.73.510.592.263,-
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.180.500.000,-
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.649.514.275,-
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.82.000.000,-
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.235.000.000,-
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.24.651.298.704,-

- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.40.792.500.000,-.

#### Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.13.989.450.000,- terdiri atas :
- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.935.950.000,-
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.053.500.000,-
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,-

#### Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.23.273.308.815,- terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.23.273.308.815,-.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.87.329.857.585,- terdiri atas :
- a. jasa giro;
  - b. pendapatan BLUD;
  - c. pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan



Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan

- d. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,-
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.029.857.585,-
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (5) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.300.000.000,-

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.244.552.137.932,-, yang terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.052.050.984.000,-
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.192.501.153.932,-.

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.2.052.050.984.000,-, terdiri atas :
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah; dan
  - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.827.414.954.000,-;

- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-;
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.224.636.030.000,-.

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.192.501.153.932,- terdiri dari :
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.192.501.153.932,-
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

#### Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.100.000.000,- terdiri atas :
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.100.000.000,-
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.

#### Pasal 13

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,- terdiri atas :
  - a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat;

- b. pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya;
  - c. pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri;
  - d. pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri; dan
  - e. sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.100.000.000,-.
  - (3) Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.
  - (4) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.
  - (5) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
  - (6) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00.

#### Pasal 14

- (1) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.0,00. terdiri atas dana darurat.
- (2) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00.

#### Pasal 15

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.0,00,- terdiri atas lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00,-

#### Pasal 16

Belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.546.433.417.574,- yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 17

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.931.753.904.282,- yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.172.440.204.311,-

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.710.813.672.387,-

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0.00,-

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 37.177.877.584,-

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.322.150.000,-.

#### Pasal 18

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.172.440.204.311,- terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.598.857.175.789,-
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.212.215.379.601,-
  - (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.176.639.745.062,-
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.932.666.607,-
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.174.451.868,-
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000,-
  - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.130.388.600.000,-
  - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.20.239.065.384,-.

#### Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.710.813.672.387,- terdiri atas :

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.128.989.652.874,-
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.307.097.001.338,-
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.653.032.934,-
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.135.756.693.040,-
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.717.600.000,-
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.636.000.000,-
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.59.963.692.201,-.

#### Pasal 20

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.0,00,- yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain;
  - c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);

- d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
  - e. Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi); dan
  - f. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-
  - (3) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-
  - (4) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
  - (5) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-
  - (6) Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,- dan
  - (7) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

#### Pasal 21

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) direncanakan sebesar Rp0,00,-, yang terdiri atas:
  - a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
  - b. Belanja Subsidi kepada BUMD;
  - c. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta; dan
  - d. Belanja Subsidi kepada Koperasi;
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (3) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (4) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,- dan

- (5) Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

#### Pasal 22

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.37.177.877.584,- yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. belanja hibah kepada BUMN;
  - d. belanja hibah kepada BUMD;
  - e. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - f. belanja hibah Dana BOS;
  - g. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (4) Belanja hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (5) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (6) Belanja hibah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.34.629.625.584,-
- (7) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (8) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.548.252.000,-.



### Pasal 23

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.11.322.150.000,- terdiri atas :
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
  - d. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.96.150.000,-
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000,-
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.136.000.000,-
- (5) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-

### Pasal 24

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp.221.747.618.500,-, terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.451.500.000,-
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.298.996.091,-
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.61.869.051.050,-
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.112.122.689.359,-
  - (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.861.382.000,-
  - (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.144.000.000,-

#### Pasal 25

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.2.451.500.000,- terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah; dan
  - b. belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.451.500.000,-
- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

#### Pasal 26

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.43.298.996.091,- yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;

- i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat eksplorasi;
  - k. belanja modal alat pengeboran;
  - l. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - m. belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - n. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - o. belanja modal alat peraga;
  - p. belanja modal peralatan proses/produksi
  - q. belanja modal rambu-rambu
  - r. belanja modal peralatan olahraga
  - s. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - t. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.438.911.620,-
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.570.850.000,-
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.45.342.600,-.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.685.000,-.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.250.097.580,-.
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.866.792.200,-.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.197.457.001,-.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.388.618.450,-.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.414.095.840,-.
- (11)Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.856.484.000,-.
- (12)Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.47.500.000,-.
- (13)Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.560.000.000,-.
- (14)Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 0,00,-.
- (15)Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.593.351.800,-.
- (16)Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (17)Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (18)Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.4.655.410.000,-
- (19)Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.188.800.000,-
- (20)Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (21)Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.1.203.600.000,-.

#### Pasal 27

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.61.869.051.050,-, yang terdiri atas :

- a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal bangunan menara;
  - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - e. belanja modal Gedung dan bangunan BLUD.
- (2) belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.911.703.050,-.
- (3) belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (4) belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.870.348.000,-.
- (6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.87.000.000,-.

#### Pasal 28

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 112.122.689.359,-, yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.86.584.220.857,-.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.088.468.502,-.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.450.000.000,-. dan
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

#### Pasal 29

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.1.861.382.000,- yang terdiri atas :
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro;
  - c. belanja modal barang bercorak kesenian;
  - d. belanja modal hewan;
  - e. belanja modal biota perairan;
  - f. belanja modal tanaman;
  - g. belanja modal barang koleksi non budaya;
  - h. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
  - i. belanja modal aset tidak berwujud;
  - j. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - k. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.297.942.000,-.
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (4) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.875.440.000,-.
- (5) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (6) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (7) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.388.000.000,-.
- (8) Belanja modal barang koleksi non budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (9) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (10) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.0,0,-.
- (11) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (12) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.300.000.000,-.

#### Pasal 30

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.144.000.000,-, yang terdiri atas :
- belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
  - belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.144.000.000,-.

#### Pasal 31

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000.200,-, yang terdiri atas belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.000.000.200,-.

### Pasal 32

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp.385.931.894.592,-, yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.813.266.012,-.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.369.118.628.580,-.

### Pasal 33

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.16.813.266.012,- yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.414.321.124,-
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.398.944.888,-

### Pasal 34

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.369.118.628.580,-, yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.369.118.628.580,-.

#### Pasal 35

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.21.045.452.000,- yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 36

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp.21.045.452.000,-, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.21.045.452.000,-.

#### Pasal 37

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.045.452.000,- yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. penghematan belanja;
  - c. sisa belanja lainnya; dan
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-.
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.045.452.000,-.
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

#### Pasal 38

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-, yang terdiri atas :

- a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00,-
  - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00,-
  - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
  - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00,-
  - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00,-.

#### Pasal 39

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.21.045.452.000,-.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.21.045.452.000,-.

#### Pasal 40

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan

Perkada tentang Penjabaran APBD dengan  
Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 41

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 28 Desember 2022  
Pj. BUPATI KAMPAR

ttd

KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 28 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 196710212000121001

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>278.735.827.642</b>
4.1.01	Pajak Daerah	154.143.211.242
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.712.100.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.712.100.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.712.100.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.279.706.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.279.706.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.279.706.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.050.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.050.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.050.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	73.510.592.263
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	73.510.592.263
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	73.510.592.263
4.1.01.11	Pajak Parkir	180.500.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	180.500.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	180.500.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.649.514.275
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.649.514.275
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.649.514.275
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.235.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.235.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.235.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.651.298.704
4.1.01.15.01	PBBP2	24.651.298.704
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	24.651.298.704
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.792.500.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	40.792.500.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	40.792.500.000
4.1.02	Retribusi Daerah	13.989.450.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.935.950.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	275.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	275.000.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	35.000.000
4.1.02.01.07.0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	35.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	700.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	700.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.300.950.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.300.950.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.053.500.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.122.500.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	154.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	110.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	50.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	808.500.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	66.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	66.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	615.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	200.000.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	65.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	350.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	23.273.308.815
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	21.568.308.815
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	21.568.308.815
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.555.000.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.555.000.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87.329.857.585
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	82.029.857.585
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	82.029.857.585
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	82.029.857.585
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.244.552.137.932</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.052.050.984.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.827.414.954.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	607.381.208.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	242.392.075.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	14.800.347.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	531.491.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	312.000.000.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	22.760.290.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	794.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.484.568.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10.098.087.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.556.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	821.729.594.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	821.729.594.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.493.099.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.295.878.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.799.943.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.056.189.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.693.217.000
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	416.478.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	231.394.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	368.811.053.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	126.813.600.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.575.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	161.297.343.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.161.250.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.229.879.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.433.000.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.203.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	45.750.802.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.624.434.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	369.370.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	386.000.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.369.375.000
4.2.01.05	Dana Desa	224.636.030.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	224.636.030.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	224.636.030.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	192.501.153.932
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	192.501.153.932
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.501.153.932
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	41.898.400.738
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.048.895.146
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.850.969.454
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.297.230.042
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.405.658.552
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.100.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.100.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.100.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.100.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.100.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.525.387.965.574</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.931.753.904.282</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.172.440.204.311
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	598.857.175.789
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	468.021.651.429



**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	398.614.188.526
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	69.407.462.903
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	39.138.367.058
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.909.456.538
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.228.910.520
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.678.451.640
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.678.451.640
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	34.640.422.484
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.438.395.336
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.202.027.148
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.710.932.820
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.575.594.680
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	135.338.140
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	22.481.483.121
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.571.481.211
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	910.001.910
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	486.587.987
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	486.587.987
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.409.893
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.320.058
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	89.835
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.758.636.250
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.171.511.834
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	587.124.416
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	983.805.006
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	955.980.267
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	27.824.739
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.951.428.101
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.867.957.674
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	83.470.427
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	212.215.379.601
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	172.227.916.601
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	167.783.858.101
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.444.058.500
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	33.386.443.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	33.386.443.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.601.020.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.601.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	176.639.745.062
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.707.160.562
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	85.605.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	313.985.300
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	52.500.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.675.529.613
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	9.025.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	82.475.714
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.100.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	211.750.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.232.564.935
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.039.625.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	699.472.500
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	17.500.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	45.200.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	77.500.000
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.750.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	65.047.500
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	45.925.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.500.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	34.050.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	161.297.343.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	161.297.343.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.229.879.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5.229.879.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.161.250.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.161.250.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	544.640.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	487.640.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	57.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.932.666.607
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.037.595.400
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.037.595.400
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.631.157.516
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	69.519.020
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.552.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.780.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.780.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.451.868
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	130.388.600.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	130.388.600.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	130.388.600.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	20.239.065.384
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	20.239.065.384
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	20.239.065.384
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.813.672.387
5.1.02.01	Belanja Barang	128.989.652.874
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	128.080.118.864
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.374.632.500
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	877.805.450
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.801.117.070
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	39.780.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.355.718.264
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	6.000.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.555.056.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.512.006.716
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	518.462.485
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	114.765.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	195.229.950
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	147.171.100
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	484.174.461
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.370.635.157
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.173.289.923
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	356.542.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	124.001.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	492.500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.770.388.350
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	469.412.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	24.900.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	192.556.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.315.311.430
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.504.982.100
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.897.554.708
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	112.500.000
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.168.706.000
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	2.759.496.300
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	84.840.250
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.275.874.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	310.145.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.171.890.400
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.083.391.200
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	367.576.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.111.789.700
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	46.200.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.843.357.350
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	224.634.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	39.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.388.128.500
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	407.348.500
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	8.010.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	909.534.010
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	8.325.400
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	23.198.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	877.110.610
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	307.097.001.338
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	260.087.518.385
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.048.010.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	29.148.310.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	277.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.391.936.960
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.523.100.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	7.375.535.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.089.600.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.233.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	48.107.299.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.472.038.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	84.080.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.217.658.104
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.294.217.760
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	542.200.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.772.900.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	290.400.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	572.480.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	230.940.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	68.450.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	96.300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.863.303.800
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	298.830.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.325.469.500
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.383.330.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.444.340.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.660.647.800
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.606.090.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	9.800.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	185.600.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.139.075.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	140.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	76.738.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.307.250.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	445.900.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	120.642.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	19.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	790.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.618.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	32.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	977.134.620
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.959.085.151
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	736.283.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.048.507.760
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	64.375.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.384.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	521.406.430
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	93.055.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.819.857.967
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.410.500.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.990.400.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.353.028.354
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	65.929.613
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	316.250.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	316.250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.303.617.656
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.500.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	88.500.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.250.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.495.540.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	203.600.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	39.000.000
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.800.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.633.327.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	37.400.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	38.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	145.900.656
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	85.800.000
5.1.02.02.04.0150	Peralatan Pemancar HF/SW	20.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	945.000.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	350.000.000
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	192.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.396.560.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.052.110.000
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	13.750.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.302.700.000
5.1.02.02.05.0044	Belanja Sewa Motel	28.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	349.100.000
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	313.100.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	30.000.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	6.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.964.462.180
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.298.927.020
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.535.000.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	22.827.400
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	660.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	800.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	40.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	930.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	180.652.500
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.025.373.760
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.916.900.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.078.124.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	375.000.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	101.657.500
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	133.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	33.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	50.000.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	50.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	470.000.000



**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	470.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.206.635.150
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.308.938.150
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.260.300.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	637.397.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	60.653.032.934
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.022.189.879
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	654.400.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	100.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	270.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	170.180.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.847.580.594
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.152.914.575
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	96.258.410
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.868.700
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	18.150.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	31.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	315.061.600
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.968.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.093.501.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.440.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.835.680.100
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.586.000
5.1.02.03.02.0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	232.000.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	5.538.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	2.000.000
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	920.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	21.000.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	784.172.900
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	235.562.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	84.000.000
5.1.02.03.02.0479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	12.500.000
5.1.02.03.02.0490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	13.608.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	985.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.038.831.890
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.184.383.090
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	50.000.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.608.448.800
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	196.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.592.011.165
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	6.514.200.000
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	542.100.000
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	946.961.165
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	220.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.925.000.000
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	291.000.000
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	152.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	135.756.693.040
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.756.693.040
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.214.514.640
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	81.850.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.460.328.400
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.717.600.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.513.900.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.455.900.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	58.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.203.700.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.203.700.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.636.000.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.636.000.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.636.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.963.692.201
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.963.692.201
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.963.692.201
5.1.05	Belanja Hibah	37.177.877.584
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.629.625.584
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.016.448.250
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.016.448.250
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.065.420.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	60.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.005.420.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	23.447.757.334
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.690.200.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.757.557.334
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.322.150.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	96.150.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	96.150.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	96.150.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	90.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	90.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	90.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	11.136.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	11.136.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	11.136.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>221.747.618.500</b>

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.451.500.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.451.500.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.451.500.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.451.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.298.996.091
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	438.911.620
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	325.142.500
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	161.842.500
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	163.300.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	113.769.120
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	29.472.120
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	657.000
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	17.460.000
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	6.180.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	60.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.570.850.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.570.850.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.570.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	538.350.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	358.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	138.500.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	300.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	666.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	45.342.600
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	27.172.800
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	27.172.800
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	18.169.800
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	16.849.800
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.320.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	21.685.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	21.685.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.000.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.340.000
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	6.345.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	6.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.250.097.580
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	698.637.900

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	304.126.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	394.511.900
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.859.613.840
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.611.478.900
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	38.286.700
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	376.721.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.394.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	636.245.700
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	194.487.540
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	691.845.840
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	489.262.740
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	123.432.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	15.725.100
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	63.426.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.866.792.200
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.034.022.200
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	218.402.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	126.383.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	219.515.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	170.100.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	30.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	269.622.200
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	780.000.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	780.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	52.770.000
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	52.770.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.197.457.001
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.056.757.001
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.056.757.001
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	140.700.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	140.700.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.388.618.450
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	153.210.450
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	61.710.450
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	91.500.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	200.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	200.000.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.035.408.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	1.028.208.000
5.2.02.08.08.0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	7.200.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.414.095.840
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.043.937.840
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	43.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.854.714.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.145.823.840
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	370.158.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.620.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	108.780.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	255.758.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	856.484.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	856.484.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	856.484.000
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	47.500.000
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	47.500.000
5.2.02.12.01.0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	47.500.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	560.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	560.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	560.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	593.351.800
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	350.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	350.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	593.001.800
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	593.001.800
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	4.655.410.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.655.410.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	4.655.410.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	188.800.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	188.800.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	150.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	38.800.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.203.600.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.203.600.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.203.600.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.869.051.050

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.911.703.050
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	53.911.703.050
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.097.666.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.331.394.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.696.956.050
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	13.536.687.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	363.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	886.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.870.348.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.870.348.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	7.845.348.000
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	25.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	87.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	87.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	87.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.122.689.359
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	86.584.220.857
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	65.404.670.857
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	52.358.325.291
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	31.108.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	13.015.237.566
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	21.179.550.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	21.179.550.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	25.088.468.502
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.106.588.902
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	8.106.588.902
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	7.112.000
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	7.112.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	16.974.767.600
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.457.247.100
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	2.997.000.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	12.520.520.500
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	450.000.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	300.000.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	300.000.000
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	150.000.000
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	150.000.000

**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.861.382.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	297.942.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	273.942.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	238.682.000
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	14.160.000
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	21.100.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	24.000.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	24.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	875.440.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	875.440.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	875.440.000
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	388.000.000
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	388.000.000
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	388.000.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	300.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	300.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	300.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	144.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	144.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	144.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	144.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.000.000.200</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.200
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.200
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.200
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.200
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>385.931.894.592</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.813.266.012
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	15.414.321.124
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.414.321.124
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.414.321.124
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.398.944.888
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.398.944.888
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.398.944.888
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	369.118.628.580
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	369.118.628.580
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	369.118.628.580



**KABUPATEN KAMPAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	1.800.000.000
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	224.636.030.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	142.682.598.580
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.546.433.417.574</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(21.045.452.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.045.452.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.045.452.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	21.045.452.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	21.045.452.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	21.045.452.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>21.045.452.000</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21.045.452.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Pj. Bupati Kampar

ttd

K A M S O L